



RASIONALISASI DEFISIT DENGAN OPTIMALISASI PENDAPATAN

Kecil, Peluang RAPBD 2022 Tembus Rp 2 Triliun

YOGYA (KR) - Untuk pertama kalinya nota keuangan RAPBD Kota Yogya 2022 bisa menembus Rp 2 triliun, tepatnya Rp 2,012 triliun. Akan tetapi peluang tersebut semakin kecil seiring keharusan bagi Pemkot Yogya untuk melakukan rasionalisasi defisit anggaran.

Menurut Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Yogya Danang Rudyatmoko, dalam nota keuangan RAPBD 2022 yang disampaikan kepala daerah, defisit anggaran yang direncanakan mencapai 8,36 persen. Akan tetapi dalam aturan baru Peraturan Menteri Keuangan nomor 116/2021, bagi daerah dengan fiskal tinggi defisit anggaran tidak boleh di atas

5 persen. "Kota Yogya masuk fiskal tinggi karena pendapatan daerahnya mencapai lebih dari Rp 500 miliar. Sehingga harus ada rasionalisasi defisit dari 8,36 persen menjadi 5 persen," terangnya dalam jumpa media, Senin (15/11).

Selain rasionalisasi defisit, dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah juga mengalami penurunan karena dampak pandemi.

Otomatis, sektor pendapatan secara umum juga akan berkurang dari perencanaan sebelumnya. Kondisi tersebut turut berimbas pada neraca anggaran secara keseluruhan.

Danang mengaku, upaya paling mudah untuk melakukan rasionalisasi ialah mengurangi pos belanja yang disesuaikan dengan pos pendapatan. Sehingga neraca RAPBD 2022 dipastikan akan berada di bawah Rp 2 triliun. Akan tetapi dirinya justru mendorong agar eksekutif mengoptimalkan sektor pendapatan agar pos belanja yang sudah direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat ti-



Ketua DPRD Kota Yogya menjabarkan RAPBD 2022.

dak diutak-atik. "Setidaknya pertahankan bisa menyentuh Rp 2 triliun karena itu semua akan kembali ke masyarakat. Jadi harus ada inovasi untuk mengoptimalkan pendapatan," urainya.

Pos penerimaan daerah

yang dimaksud, imbuh Danang, terutama pada tiga aspek yakni pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer dari pusat dan dana perimbangan. Khusus PAD, sektor pajak tidak perlu dinaikkan agar tidak membebani wajib

pajak. Akan tetapi lebih pada menggali potensi retribusi, menaikkan target pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lain-lain yang sah.

Di samping itu, OPD yang berpotensi bisa menambah penerimaan daerah pun didorong berinovasi untuk mendorong pendapatan. Dicontohkannya Dinas Perdagangan agar bisa menangkap potensi lapak digital, Dinas Perhubungan membuat sistem digital informasi kapasitas parkir serta OPD lain untuk mengulirkan kegiatan yang memiliki timbal balik terhadap pendapatan daerah. "Inovasi

dari tiap OPD ini sangat penting karena imbasnya bagi pembangunan kota cukup luas. Terutama menguatkan iklim investasi Kota Yogya di tengah era digital. Dampaknya, daya saing meningkat dan ekonomi tumbuh," jelasnya.

Selain itu, Danang juga mendorong agar tiap OPD yang memiliki program unggulan agar tidak ragu mengusulkan dana alokasi khusus (DAK) ke pemerintah pusat, baik DAK fisik maupun non fisik. Pihaknya selaku lembaga dewan pun siap mendukung karena pembiayaan melalui DAK akan mengurangi beban anggaran daerah. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005